

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM Kerajinan Kayu Jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Deepa Narayan (2002), maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Akses Informasi telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro melalui berbagai program sosialisasi, pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, promosi produk, serta pemanfaatan media komunikasi seperti website dan WhatsApp. Berbagai upaya tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM kerajinan kayu jati dalam memperoleh informasi mengenai program pemberdayaan. Meskipun demikian, penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan, terutama dari aspek ketepatan waktu penyampaian dan perluasan jangkauan informasi agar seluruh pelaku UMKM memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program yang diselenggarakan.
2. Inklusi dan Partisipasi menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro telah membuka kesempatan yang



luas bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan, pendampingan, fasilitasi promosi, dan pameran produk. Keterlibatan pelaku UMKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan pemasaran. Namun demikian, tingkat partisipasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelaku usaha, aktivitas produksi, dan jadwal kegiatan yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi pelaku UMKM.

3. Akuntabilitas telah diterapkan melalui penyusunan laporan kegiatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi program. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemberdayaan yang transparan dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, penyampaian hasil evaluasi kepada pelaku UMKM dan penguatan mekanisme tindak lanjut terhadap masukan peserta masih perlu ditingkatkan agar akuntabilitas program semakin optimal.
4. Kapasitas Organisasi Lokal menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas organisasi yang cukup baik dalam melaksanakan strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan dinas dalam menyusun program kerja, melaksanakan pembinaan dan pelatihan,

membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, memfasilitasi promosi produk, serta melakukan monitoring dan evaluasi program. Namun demikian, peningkatan kapasitas organisasi masih diperlukan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar program pemberdayaan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan **cukup baik** berdasarkan empat indikator pemberdayaan menurut Deepa Narayan (2002), yaitu akses informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, serta kapasitas organisasi lokal. Berbagai program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, perluasan akses pasar, serta penguatan daya saing usaha. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek pemerataan akses informasi, optimalisasi partisipasi pelaku UMKM, penguatan transparansi dan tindak lanjut evaluasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar strategi pemberdayaan dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemberdayaan UMKM Kerajinan Kayu Jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha

Mikro Kabupaten Bojonegoro, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro

Dinas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi mengenai program pemberdayaan dengan memanfaatkan media digital secara lebih optimal, seperti website resmi, media sosial, dan grup komunikasi pelaku UMKM. Penyampaian informasi juga perlu dilakukan lebih awal agar pelaku UMKM memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan, pendampingan, maupun kegiatan promosi.

Selain itu, dinas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dengan menyelenggarakan program yang lebih fleksibel dari segi waktu dan lokasi pelaksanaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelaku UMKM, khususnya pengrajin kayu jati yang memiliki keterbatasan waktu karena aktivitas produksi.

Dalam aspek akuntabilitas, dinas perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyampaikan hasil evaluasi kepada pelaku UMKM sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban. Hasil evaluasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Untuk memperkuat kapasitas organisasi, dinas diharapkan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM, serta mengembangkan inovasi berbasis teknologi digital dalam pelaksanaan program pemberdayaan agar pelayanan kepada pelaku UMKM menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Pelaku UMKM Kerajinan Kayu Jati

Pelaku UMKM diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah serta berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, pendampingan, dan promosi produk. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji strategi pemberdayaan UMKM berdasarkan empat indikator pemberdayaan menurut Deepa Narayan (2002) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori pemberdayaan atau tata kelola publik yang berbeda, menambahkan variabel lain seperti efektivitas program, keberlanjutan usaha, atau transformasi

digital UMKM, serta memperluas objek penelitian pada sektor UMKM lain maupun wilayah yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Buku*
- Ansell, Chris; Gash, Alison. (2007). *Journal of Public Administration Research & Theory, Collaborative Governance in Theory and Practice*. Vol. 18 Issue 4, p543- 571. 29p
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance regimes*. Georgetown University Press.
- Etzkowitz, H. (2008). *The Triple Helix: University–industry–government innovation in action*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Buerrero, M., Urbano, D., & Herrera, F. (2021). Innovation ecosystems and entrepreneurial universities: A triple helix perspective. *Research Policy*, 50(6), 104–120. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104217>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/IJTM.2009.023374>
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Sudjiono. (2020). Improving small and medium business innovation knowledge transfer through triple helix agents. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(5), 890–905.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for Collaborative Governance . *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix—University–industry–government relations: A laboratory for knowledge-based economic development. *EASST Review*, 14(1), 14–19.
- Farid, A., & Wulandari, S. Z. (2021). Model transformasi strategis UMKM Batik Pringmas berbasis perubahan Lewin dan kolaborasi triple helix. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 45–60. <https://doi.org/10.32424/jeb.v24i1.7890>
- Khourouh, U., Ratnaningsih, C. S., & Rahayudi, B. (2021). Inovasi dan daya saing UMKM di era new normal: Dari triple helix model ke quadruple helix model. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(3), 201–215. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i3.6789>
- Kurniawan, T., Suryanto, A., & Hidayat, R. (2025). Triple helix collaboration for sustainable rural SMEs. *Journal of Cleaner Production*, 412, 138765. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.138765>
- Leydesdorff, L., & Etzkowitz, H. (1998). The Triple Helix as a model for innovation studies. *Science and Public Policy*, 25(3), 195–203. <https://doi.org/10.1093/spp/25.3.195>
- Nugroho, Y., Putri, A., & Santoso, B. (2023). Digital transformation of SMEs in emerging economies: A triple helix analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 190, 122402. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122402>
- Putra, R., & Handayani, S. (2022). Triple helix and SME competitiveness in Indonesia. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(24), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00210-3>
- Ranga, M., & Etzkowitz, H. (2013). Triple Helix systems: An analytical framework for innovation policy and practice in the knowledge society. *Industry and Higher Education*, 27(4), 237–262. <https://doi.org/10.5367/ihe.2013.0165>
- Sari, D., Rahman, F., & Wijaya, A. (2024). Strengthening rural SMEs through triple helix collaboration. *Sustainability*, 16(4), 1789. <https://doi.org/10.3390/su16041789>
- Supriadi, A., Permana, I., Afandi, D. R., Arisonndha, E., & Kusumaningsih, A. (2023). The triple helix model: University–industry–government collaboration and its role in SMEs innovation and development. *Journal of Small Business and Entrepreneurship Development*, 11(2), 77–92. <https://doi.org/10.15640/jsbed.v11n2a6>
- Tambunan, T. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(18), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4>

Torfig, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. *Administration & Society*, 51(5), 795–825.

<https://doi.org/10.1177/0095399716680057>

Wafa, M., & Masrohatin, S. (2024). *Collaborative Governance* and triple helix in rural SMEs. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 45–60.

<https://doi.org/10.26740/jiap.v12n1.p45-60>

Zainatha, A., Shalsabilla, E. V., & Pratiwi, R. (2022). Optimalisasi UMKM melalui triple helix kolaborasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 123–134. <https://doi.org/10.1234/jieb.v15i2.5678>

Zhang, Y., & Chen, K. (2021). Digital transformation and SME performance: Evidence from developing economies. *Journal of Small Business*

Management, 59(6), 1121–1145.

<https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1711818>

Laporan / Publikasi Institusi

Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan perkembangan UMKM Indonesia 2023*. <https://kemenkopukm.go.id>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional*. <https://kemenkopukm.go.id>

OECD. (2023). *SME and entrepreneurship outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD SME and entrepreneurship outlook 2019*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>

World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance*. <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>